



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

JUMAT, 20 APRIL 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejari Terus Periksa Saksi Kasus DPPKAD

RBI, BENGKULU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu I Made Sudarmawan SH, MH melalui Kasi Pidsus Oktalian Darmawan SH, mengatakan, kasus dugaan penyelewengan dana Beban Kerja (BK) pada DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 itu, sembari menunggu hasil audit dari BPKP tim Penyidik akan terus melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dalam kasus tersebut.

Menurutnya, dalam hearing aksi demo oleh Majelis Pemuda Panca Sila Kota Bengkulu, beberapa waktu lalu mereka mengaku bahwa mantan Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan BPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 lalu, Ikhsanul Arif alias Itang mengaku kepada mereka bahwa dialah yang melakukan penandatanganan kwitansi pencairan uang Rp 500 Juta yang beredar tersebut. "Nanti kita panggil lagi Ikhsanul Arif, kita panggil juga orang yang mengatakan Ikhsanul Arif yang tanda tangan kwitansi itu.

Kedua mereka nantinya akan kita konfrontir," ucap Oktalian. Dikatakan, Ikhsanul Arif sudah beberapa kali dipanggil dan diperiksa oleh tim Penyidik yang menangani kasus ini. Tetapi selama proses pemeriksaan dia tidak pernah mengakui bahwa dia yang menandatangani kwitansi pencairan uang Rp 500 Juta itu. Sejauh ini untuk memastikan siapa yang

melakukan penandatanganan di kwitansi itu juga sudah diuji lab.

"Ya, kitakan sudah pernah memanggil Itang itu. tetapi dia tidak pernah mengakui bahwa dia yang tandatangan di kwitansi pencairan tersebut. Nantilah kita lihat kapan yang bersangkutan (Itang red) kita panggil, nanti kita kita koordinasi dulu dengan tim Penyidik," demikian ucapnya.

Untuk diketahui, dana BK yang dikucurkan untuk ratusan ASN tahun 2015 itu, Diduga menyalahi aturan dan ada dua perwal yaitu Perwal nomor 12 pada tahun dan perwal Nomor 12. Untuk Perwal Nomor 36 jabatan Kadis mendapatkan Rp 6,5 Juta, Sekretaris Rp 5 Juta, Kabid Rp 5 Juta, Staf ASN Rp 1,5 juta sementara honorer Rp menerima Rp 1 Juta. Kemudian Perwal Nomor 36 dana BK untuk Kadis naik menjadi 12 Juta, Sekretaris Rp 9 Juta, Kabid Rp 9 Juta, dan Kasi menerima Rp 5 Juta. Staf ASN Rp 3,5 Juta dan honorer naik menjadi Rp 3 Juta. Dari total anggaran Rp 1,8 yang dikucurkan untuk dana BK itu diduga ada kerugian negara Rp 1,6 Miliar. Dari keterangan Mantan Kepala DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 dari uang Rp 1,6 Miliar itu Rp 500 Juta diduga digunakan untuk mengamankan praperadilan seseorang. Sementara sisanya Rp 1,1 Miliar lagi tidak tahu dan tidak jelas kemana. (ide)